

## **Implementasi Permendagri No 114 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukoharjo**

### **Implementation of Permendagri No. 114 of 2018 concerning Minimum Service Standards for Fire Disaster Management in Sukoharjo Regency Fire Fighting Units**

**Vika Rianggi Putri<sup>1</sup>, Wirid Winduro, SSI, M.Si<sup>2</sup>, Dra. Damayanti Suhita, M.Si<sup>3</sup>**

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

[vikarianggi08@gmail.com](mailto:vikarianggi08@gmail.com), [wiridwinduro@gmail.com](mailto:wiridwinduro@gmail.com), [diekatik@gmail.com](mailto:diekatik@gmail.com)

#### **Abstrak**

Implementasi kebijakan merupakan salah satu hal terpenting dalam menjalankan pemerintahan. Jika kebijakan yang telah dibuat tidak diimplementasikan dengan baik maka tidak akan berdampak apapun pada sasaran. Bencana kebakaran menurut *International Labour Organization* (ILO, 1991), kebakaran merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan dan kadangkala tidak dapat dikendalikan, sebagai hasil pembakaran suatu bahan dalam udara dan mengeluarkan energi panas dan nyala api. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Permendagri No 114 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan empat indikator teori dari George Edwards III yang terdiri dari: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Sikap Pelaksana/Disposisi, (4) Struktur Birokrasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Unit analisis adalah individu dan pengumpulan data dilakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memberikan informasi tentang hasil Implementasi Permendagri No 114 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan hasil penelitian tersebut secara umum implementasi yang diterapkan sudah baik akan tetapi belum optimal, ditunjukkan dengan hasil sebagai berikut: (1) Implementasi dalam hal komunikasi yang dilakukan pemadam kebakaran sukoharjo sudah baik namun belum optimal dilihat dari sosialisasi tidak diadakan secara spesifik, (2) Implementasi dalam hal sumberdaya sudah baik namun belum optimal dilihat dari pos pemadam kebakaran belum tercukupi, (3) implementasi dalam hal sikap pelaksana sudah dilakukan dengan baik dilihat dari semua anggota memiliki semangat dan komitmen bekerja dengan sebaik-baiknya, (4) implementasi dalam hal struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik dilihat dari anggota pemadam kebakaran melakukan kegiatan sesuai SOP dan penyebaran tanggungjawab sesuai dengan jadwal kerja shift.

**Kata kunci:** Implementasi, Permendagri, Komunikasi, Sumberdaya, Sikap Pelaksana, Struktur Birokrasi, Pemadam Kebakaran

### **Abstract**

*Policy implementation is one of the most important things in running a government. if the policy that has been made is not implemented properly then it will not have any impact on the target.. Fire disasters according to the International Labor Organization (ILO, 1991), fire is an unwanted and sometimes uncontrollable event, as a result of burning a material in the air and emitting heat and flame energy. This study aims to determine the Implementation of Permendagri No. 114 Year 2018 concerning Minimum Service Standards for Fire Disaster Management at the Sukoharjo District Fire Department. This study uses four theoretical indicators from George Edwards III which consist of: (1) Communication, (2) Resources, (3) Executor's Attitude/Disposition, (4) Bureaucratic Structure. The method used is qualitative and the data analysis technique used is descriptive. The unit of analysis is an individual and data collection is carried out by interviews, observation, and documentation to provide information about the results of the Implementation of Permendagri No. 114 of 2018 concerning Minimum Service Standards for Fire Disaster Management in Sukoharjo Regency Fire Fighting Units. Based on the results of this study, in general the implementation that has been implemented is good but not optimal, as shown by the following results: (1) Implementation in terms of communication by the Sukoharjo fire department is good but not optimal seen from the socialization not held specifically, (2) Implementation in terms of resources is good but not optimal in terms of firefighters' posts that have not been fulfilled, (3) implementation in terms of the attitude of the executors have been carried out well seen from all members having the enthusiasm and commitment to work as well as possible, (4) implementation in terms of structure The bureaucracy has been running well, seen from the members of the fire department carrying out activities according to the SOP and the distribution of responsibilities according to the shift work schedule.*

**Keywords:** *Implementation, Permendagri, Communication, Resources, Executor's Attitude, Bureaucratic Structure, Fire Extinguisher*

### **PENDAHULUAN**

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Definisi Bencana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana). Bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa

yang disebabkan oleh alam seperti tanah longsor, gempa bumi, kebakaran dan tsunami. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain epidemi, gagal teknologi, dan wabah penyakit, sedangkan bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia meliputi konflik antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Bencana kebakaran merupakan bencana yang lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia dengan dampak kerugian harta benda, terhentinya usaha, terhambatnya perekonomian dan pemerintahan bahkan korban jiwa.

Bencana kebakaran menurut *International Labour Organization* (ILO, 1991), kebakaran merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan dan kadangkala tidak dapat dikendalikan, sebagai hasil pembakaran suatu bahan dalam udara dan mengeluarkan energi panas dan nyala api. Kebakaran dapat dibagi berdasarkan penyebabnya yaitu kebakaran tipe A, tipe B, dan tipe C. kebakaran tipe A disebabkan bahan padat seperti kertas, kayu, yang cara pemadamannya dapat menggunakan pasir, air, dan karung goni yang dibasahi menggunakan air. Kebakaran tipe B disebabkan bahan cair atau gas yang mudah terbakar seperti bensin, solar, spirtus, yang dapat dipadamkan menggunakan pasir tepung (*Dry Powder*) dan busa (*Foam*). Tidak disarankan memadamkan kebakaran yang disebabkan oleh bahan cair menggunakan air karena beresiko kebakaran akan lebih menyebar. Kebakaran tipe C disebabkan oleh listrik yang dapat menimbulkan panas seperti konsleting atau arus pendek yang mengenai bahan yang mudah terbakar. Cara pemadaman harus menghentikan arus listrik yang tersambung ke lokasi kebakaran.

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah dalam kaitannya untuk mengendalikan bencana kebakaran. Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu yang mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal dalam penanggulangan bencana kebakaran. Kabupaten Sukoharjo seluas 493,2 km<sup>2</sup> terdiri dari 12 Kecamatan, 17 Kelurahan, dan 150 desa. Standar pelayanan Minimal dalam penanggulangan bencana kebakaran ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Meskipun Kabupaten ada 12 Kecamatan belum semuanya adanya pos pemadam kebakaran. Standar pelayanan pemadam kebakaran seharusnya disetiap 17 km ada satu pos damkar, sedangkan di Kabupaten Sukoharjo itu sendiri hanya terdapat 1 pos. Pada tahun 2021 sampai 2022 naiknya tinggi kasus kebakaran di Kabupaten Sukoharjo bahwa jumlah kebakaran yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021 terjadi 80 kasus kebakaran dan ditahun 2022 adalah 90 Kasus Kebakaran. Bencana kebakaran tersebut ada yang ditangani oleh Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukoharjo, karena terjadi di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Penyebab kebakaran didominasi karena faktor kelalaian manusia seperti konsleting listrik dan meninggalkan sumber api seperti tidak mematikan sisa sampah yang dibakar pada akhirnya merembet kebangungan sehingga menyebabkan kebakaran. Dilihat dari hal tersebut kasus kebakaran menjadi sorotan Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukoharjo dengan terus melakukan upaya menekan kejadian, hal ini tentu saja perlu sekali adanya Standar Pelayanan Minimal yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan di delegasikan kepada Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukoharjo. Dalam hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah/Kota, disisi lain kemampuan petugas juga ditingkatkan dengan pembekalan selain itu juga menambah perlengkapan peralatan.

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Sukoharjo ialah agar adanya layanan atau respon cepat (*Response Time*) dalam penanggulangan bencana kebakaran baik dalam pelaksanaan pemadaman dan

pengendalian kebakaran ataupun dalam pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran di Kabupaten Sukoharjo. Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugasnya memiliki Standar Pelayanan Minimal yang menjadi acuan atau panduan, sehingga dengan adanya hal tersebut akan tercipta rasa aman, tenang, dan nyaman di masyarakat. Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal dan diarahkan untuk pelayanan dasar yang terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat. Standar pelayanan minimal atau mutu pelayanan dasar harus selalu diterapkan pada setiap Unit Pemadam Kebakaran maupun jajaran pemerintah, hal tersebut memiliki tujuan masyarakat akan terjamin menerima suatu pelayanan publik dalam hal ini yaitu penanggulangan kebakaran, standar pelayanan minimal sebagai alat bagi Unit Pemadam Kebakaran untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar, Standar Pelayanan Minimal dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas Unit Pemadam Kebakaran terhadap masyarakat, dan dapat menjadi argumen bagi peningkatan pajak dan retribusi daerah karena baik pemerintah daerah dan masyarakat dapat melihat keterkaitan pembiayaan dengan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Terkait dengan pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Sukoharjo implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal penanggulangan bencana kebakaran idealnya memenuhi beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu komunikasi, dalam hal ini pelaksana dalam implementasi standar pelayanan minimal penanggulangan bencana kebakaran faktor komunikasi menunjukkan peranan

sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengerti apa yang harus dikerjakan. Kedua, faktor sumber daya pada Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukoharjo juga menjadi hal yang penting agar implementasi tersebut terlaksana dengan ideal. Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam proses implementasi kebijakan, bagaimapun jelasnya aturan-aturan dan akuratnya ketentuan-ketentuan apalagi yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan tidak didukung dengan sumber daya yang memadai sama saja hasilnya tidak akan efektif. Ketiga, faktor sikap pelaksana mempengaruhi proses implementasi kebijakan, apabila pelaksana memiliki karakter yang baik maka pelaksana akan mengimplementasikan kebijakan dengan baik dan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Dan yang keempat, faktor struktur birokrasi yang panjang dan terfragmentasi (menjadi beberapa bagian) akan cenderung mengakibatkan lemahnya pengawasan dan juga mengakibatkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang kemudian berdampak kegiatan organisasi yang tidak fleksibel.

## TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi merupakan kegiatan penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Terdapat berbagai pendapat para ahli mengenai pengertian implementasi. Implementasi menurut teori Jones dalam (Mulyadi, 2015:45) menyatakan "Those Activities directed toward putting a program into effect" yang artinya (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter "Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy" yang artinya (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah

suatu kebijakan ditetapkan, implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Kemudian, menurut Grindle dalam (Mulyadi, 2015:47) menyatakan "implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu".

Selanjutnya, menurut Lister dalam (Taufik dan Isril, 2013:136) menyatakan "sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar benar memuaskan". Sedangkan menurut Ekawati dalam (Taufik dan Isril, 2013:136) menyatakan "Bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu atau kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya".

Penelitian ini menggunakan teori Edwards III (1980:9) ada empat faktor yaitu:

1. Faktor Komunikasi : suatu proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.
2. Sumberdaya : segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan suatu implementasi.
3. Sikap Pelaksana/Disposisi : sikap atau perilaku dari pelaksana kebijakan dalam menjalankan suatu kebijakan.
4. Struktur Birokrasi : karakteristik, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan dalam menjalankan suatu kebijakan.

Peneliti memilih menggunakan teori ini karena teori ini yang paling sesuai dengan permasalahan yang peneliti teliti yaitu Implementasi Permendagri No 114 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana

Kebakaran Pada Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukoharjo.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat, kata, dan gambar. Serta menjelaskan secara menyeluruh oleh suatu keadaan ataupun peristiwa dari obyek kajian penelitian yakni Implementasi Permendagri No 114 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukoharjo. Maka penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mendapatkan informasi yang deskriptif yakni memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap situasi sosial yang diteliti, Susan Stainback dalam (Sugiyono, 2016: 12)

Dalam penentuan lokasi penelitian, peneliti memilih melaksanakan penelitian ini di Unit Pemadam Kebakaran Sukoharjo yang beralamat di Balesari, Gayam, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57513. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan penulis yang memiliki keinginan untuk mendeskripsikan Implementasi Permendagri No 114 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukoharjo.

Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data ini diperoleh dari wawancara kepada informan, yaitu orang yang merespon serta memberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti baik secara lisan maupun tulisan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat narasi atau uraian penjelasan dari informan baik secara lisan maupun tulisan. Hasil datanya berupa teks hasil wawancara. Data dapat dicatat maupun direkam oleh

peneliti. Data sekunder merupakan data ini diperoleh dari data-data yang sudah tersedia dan peneliti dapat memperolehnya dengan membaca, melihat maupun mendengarkan. Data sekunder asalnya dari olahan data primer yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang termasuk dalam kategori data sekunder adalah dokumen, surat-surat, pengumuman, spanduk, foto, animasi, billboard, hasil rekaman.

Sumber data pada penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Menurut Moleong (2013: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan atau aktivitas, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Dalam penelitian ini untuk menentukan informan dilakukan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*, yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2013:85). Dalam penggunaan teknik tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi lapangan dalam penelitian mengenai Implementasi Permendagri No 114 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukoharjo.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan dipakai adalah

1. Wawancara, Menurut Esterberg dalam (Sugiyono, 2015:231) bahwa wawancara terstruktur adalah wawancara yang di mana peneliti perlu menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpul datanya. Dengan wawancara terstruktur ini peneliti akan melakukan wawancara kepada informan dengan bentuk pertanyaan akan lebih terstruktur dilokasi penelitian yakni Unit Pemadam

Kebakaran Sukoharjo sebagai subyek penelitain Implementasi Permendagri No 114 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukoharjo.

2. Dokumentasi, Menurut Sugiyono (2015:210) mengatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pada penelitian ini dokumentasi yang dilakukan dengan menggunakan tulisan catatan wawancara, foto dengan menggunakan handphone, serta arsip lainnya.
3. Observasi, Menurut Sugiyono (2015:204) observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Dalam pengumpulan data, peneliti langsung ke kantor Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukoharjo, sehingga peneliti langsung mendapatkan data yang dibutuhkan

Sedangkan untuk Uji Validitas Data dalam penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi, antara lain : Teknik triangulasi sumber data, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dalam penelitian dengan cara mengecek data yang sudah diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda kemudian dibandingkan.

Teknik Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori dari Miles, Huberman dan Saldana (2014:14) yaitu dalam menganalisis data menggunakan empat tahapan sebagai berikut: pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data

(*data condensatiom*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusions:drawing verifying*)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Permendagri No 114 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana kebakaran pada Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukoharjo agar terlaksana dengan baik Dalam melaksanakan tugasnya, pemadam kebakaran kabupaten sukoharjo mengimplementasikan permendagri No 114 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal penanggulangan bencana kebakaran guna menjamin pelayanan yang baik untuk menanggulangi hal semacamnya. Implementasi yang dilakukan oleh Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukoharjo ini dijelaskan empat faktor yang berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam implementasi ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Edwards III (1980:9) dalam (Tahir, 2014:61) dijelaskan empat faktor yang berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni : komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan strktur birokrasi.

Hasil penelitian implementasi dalam hal komunikasi yang dilakukan oleh unit pemadam kebakaran kabupaten sukoharjo yaitu Dalam penyampaian informasi dengan cara sosialisasi tidak diadakan sosialisasi yang spesifik dan dalam penginformasian secara berulang-ulang disetiap kegiatan untuk menghimbau agar seluruh anggota selalu melaksanakan Standar Pelayanan Minimal dengan cara dilakukan saat pertemuan/agenda

sosialisasi. Kepahaman anggota mengenai adanya Standar Pelayanan Minimal itu sesuai dengan daya tanggap anggota. Selanjutnya hasil penelitian yaitu sumber daya yang dilakukan oleh unit pemadam kebakaran kabupaten sukoharjo adalah Staff sudah mencukupi, namun pos belum tercukupi. staff sudah mencukupi dalam keberhasilan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dengan Pelatihan dilaksanakan secara rutin. Yang memberi pelatihan dari anggota untuk anggota dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran. Kemudian semua anggota bertanggungjawab mengenai dalam pelaksanaan Permendagri No 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran namun fasilitas dalam menunjang pelaksanaan Permendagri belum tercukupi karena hanya memiliki 1 pos damkar. Lalu biaya operasional selalu tersedia pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukoharjo adalah Biaya dari APBD. Berikutnya hasil penelitian mengenai disposisi/sikap pelaksana. pemadam kebakaran kabupaten sukoharjo adalah Semua anggota memiliki semangat yang tinggi dan komitmen bekerja dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran walaupun melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya namun tidak ada penghargaan khusus kepada para anggota/pelaksana Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan Permendagri No 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran.

Hasil penelitian implementasi dalam hal struktur birokrasi Pelayanan pada Pemadam Kebakaran

Kabupaten Sukoharjo masih mendekati sesuai SOP lalu penyebaran tanggung jawab antar anggota pemadam kebakaran mereka bekerja sesuai jadwal shift.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukoharjo mengimplementasikan permendagri No 114 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal penanggulangan bencana kebakaran guna menjamin pelayanan yang baik untuk menanggulangi hal semacamnya. Implementasi yang dilakukan oleh Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukoharjo ini dijelaskan empat faktor yang berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni : komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi . Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dianalisis adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi (Communication), implementasi dalam hal komunikasi yang dilakukan oleh unit pemadam kebakaran kabupaten sukoharjo yaitu Dalam penyampaian informasi dengan cara sosialisasi tidak diadakan sosialisasi yang spesifik dan dalam penginformasian secara berulang-ulang disetiap kegiatan untuk menghimbau agar seluruh anggota selalu melaksanakan Standar Pelayanan Minimal dengan cara dilakukan saat pertemuan/agenda sosialisasi. Kepahaman anggota mengenai adanya Standar Pelayanan Minimal itu sesuai dengan daya tanggap anggota.
2. Sumberdaya (Resourches), mengenai sumber daya yang dilakukan oleh unit pemadam

kebakaran kabupaten sukoharjo adalah staff dan armada sudah mencukupi, namun pos belum tercukupi. staff sudah mencukupi dalam keberhasilan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dengan Pelatihan dilaksanakan secara rutin. Yang memberi pelatihan dari anggota untuk anggota dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran. Kemudian semua anggota bertanggung jawab bertanggungjawab dalam pelaksanaan Permendagri No 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran namun fasilitas dalam menunjang pelaksanaan Permendagri belum tercukupi karena hanya memiliki 1 pos damkar. Lalu biaya operasional selalu tersedia pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukoharjo adalah Biaya dari APBD.

3. Disposisi/ Sikap Pelaksana (Dispotition), implementasi mengenai disposisi/sikap pelaksana. pemadam kebakaran kabupaten sukoharjo adalah Semua anggota memiliki semangat yang tinggi dan komitmen bekerja dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran walaupun melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya namun tidak ada penghargaan khusus kepada para anggota/pelaksana Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan Permendagri No 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran.
4. Struktur Birokrasi (Structure Birocration), implementasi dalam hal struktur birokrasi Pelayanan pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukoharjo masih

mendekati sesuai SOP lalu penyebaran tanggung jawab antar anggota pemadam kebakaran mereka bekerja sesuai jadwal shift.

Hasil dari penelitian ini juga terdapat temuan yang didapatkan oleh peneliti yaitu : implementasi Permendagri No 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran sudah dilaksanakan dengan baik hanya saja ada beberapa yang belum terealisasi seperti sosialisasi yang diadakan tidak spesifik dan fasilitas penunjang pelaksanaan Permendagri belum tercukupi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Wahab, Solichin. (2014). *Kebijakan Public & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung. Alfabeta.

Agus, Erwan P. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media

Edwar Elgar Publlising. (2006). *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media

Harbani Pasolong. (2014). *Kamus Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta

Miles dan Hubermann. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.

Moleong, J. Lexy. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*.

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif : dan R&D*. Bandung. Alfabeta`

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif : dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung. Alfabeta.

Tahir, Arifin.(2014). *Kebijakan Public & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung. Alfabeta.

Sumber lain:

Novianty, Fitri Eka. (2019). *Analisis Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)*. Other Tesis. Universitas Islam Riau.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Taufik dan Isril. (2013). *Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa*. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Yayan Rudianto. (2012).  
*Implementasi Kebijakan  
Penyusunan dan Penetapan  
Standar Pelayanan Minimal  
Pada Dinas Kebersihan,  
Pertamanan, dan Pemadam  
Kebakaran Kabupaten Bekasi.*  
Jurnal AKP Vol. 1, No. 2.

<http://www.ilo.org/jakarta/info/publicindex.htm>

<https://nkrinews.id/2022/10/18/standar-pelayanan-minimal-bencana-dan-kebakaran-harus-capai-target-tahun-depan/> (diakses pada 18 Oktober 2022)

<https://sukoharjo.sorot.co/berita-3480-penuhi-standar-pelayanan-minimal-damkar-sukoharjo-rekrut-personel-baru.html> (diakses pada 8 Oktober 2019)

